BAB IV

FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI ENDE

4.1. Faktor Internal Yang Mempengaruhi Perbedaan Penerapan Keadilan Restoratif

4.1.1 Perbedaan Persepsi dan Pemahaman Jaksa Terhadap Keadilan Restoratif

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Ende pada tanggal 24 dan 25 Juni 2025, ditemukan bahwa perbedaan persepsi dan pemahaman jaksa terhadap konsep keadilan restoratif menjadi faktor utama ketidakkonsistenan penerapannya, khususnya dalam perkara penganiayaan. Meskipun Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah memberikan pedoman jelas, beberapa jaksa masih menafsirkan keadilan restoratif secara formal prosedural, hanya berfokus pada syarat administratif seperti adanya surat perdamaian. Padahal, esensi keadilan restoratif seharusnya menitikberatkan pada pemulihan menyeluruh bagi korban, pelaku, dan hubungan sosial.

Hal ini tercermin dalam perbandingan kasus Winda Dewanti dan Rustam Efendi. Kasus Winda dihentikan karena ada perdamaian, sementara kasus Rustam ditolak meskipun memenuhi unsur lainnya, hanya karena

korban menolak berdamai. Persepsi bahwa jaksa hanya sebagai fasilitator pasif menyebabkan kegagalan mediasi berdampak pada inkonsistensi hasil akhir.

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa dibutuhkan pendekatan yang lebih holistic tidak hanya legal formal, tetapi juga sosiologis dan psikologis agar penerapan keadilan restoratif benar-benar adil secara substansial dan mendapat penerimaan masyarakat.

4.1.2 Kurangnya Pelatihan dan Sosialisasi Regulasi Restoratif

Penelitian ini mengungkap bahwa Perbedaan Penerapan atau ketidakkonsistenan dalam penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Ende disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan sosialisasi yang sistematis terkait Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini sebenarnya memberi ruang penyelesaian perkara secara humanis, namun dalam praktiknya banyak jaksa belum sepenuhnya memahami prinsip dasar keadilan restoratif seperti sukarela, keseimbangan, dan partisipasi korban. Akibatnya, penerapan restoratif lebih bersifat administratif dan formal daripada substantif, karena aparat hanya fokus pada terpenuhinya syarat perdamaian tanpa menggali kondisi psikologis dan motivasi para pihak.

Minimnya pelatihan teknis dan evaluasi berkala juga menyebabkan ketidakjelasan batasan perkara yang layak diselesaikan secara restoratif. Hal ini terlihat dari perbedaan penanganan antara kasus Rustam Efendi dan Winda Dewanti, meskipun keduanya merupakan tindak pidana

penganiayaan ringan. Perbedaan ini menimbulkan kesan inkonsistensi yang mencerminkan lemahnya pemahaman kontekstual aparat terhadap keadilan restoratif.

Oleh karena itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelatihan menyeluruh, termasuk bagi tokoh masyarakat dan LSM, menjadi langkah strategis untuk membangun penerapan keadilan restoratif yang adil, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

4.1.3 Keterbatasan Waktu dalam Menangani Perkara

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Juni 2025 dengan informan Rohmat Esa Hasan dari Kejaksaan Negeri Ende, beliau mengungkapkan bahwa:

“Keterbatasan waktu merupakan hambatan utama dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara penganiayaan. Beliau menambahkan, Meskipun regulasi seperti Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah memberi pedoman yang jelas, proses keadilan restoratif yang menuntut mediasi, fasilitasi damai, dan evaluasi menyeluruh seringkali terabaikan karena jaksa harus menangani banyak perkara dalam waktu terbatas.”

Berdasarkan keterangan informan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Di Kejaksaan Negeri Ende, keterbatasan ini berdampak pada kurangnya ketelitian dalam menilai keikhlasan perdamaian, memverifikasi dokumen, dan memahami kondisi psikologis para pihak. Hal ini berisiko menjadikan perdamaian hanya sebatas formalitas. Dalam beberapa kasus seperti Rustam Efendi, meskipun perkara secara teknis memenuhi syarat restorative justice, mediasi gagal dilakukan karena waktu dan pendekatan yang tidak memadai. Akibatnya, terjadi ketidakkonsistenan

dalam penerapan keadilan restoratif dan kesenjangan antara tujuan normatif dan implementasi di lapangan.

4.1.4 Kepentingan Institusi dalam Mempertahankan Otoritas Penuntutan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Juni 2025 dengan informan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ende, Dewa Kadek Dwi Naro Sigitto, menunjukkan bahwa institusi kejaksaan memiliki kepentingan strategis dalam mempertahankan otoritas penuntutan, terutama dalam konteks penerapan keadilan restoratif pada perkara penganiayaan. Meskipun Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 memberi kewenangan untuk menghentikan penuntutan jika syarat tertentu terpenuhi, keputusan tersebut tidak semata-mata administratif, tetapi juga mencerminkan pertimbangan substantif demi menjaga integritas, kepastian hukum, dan legitimasi institusi.

Dalam praktiknya, seperti pada kasus Rustam Efendi, kejaksaan memilih melanjutkan proses ke pengadilan meskipun syarat formal RJ terpenuhi. Hal ini menunjukkan kehati-hatian institusional dalam menghindari kesan keberpihakan atau kelemahan hukum. Jaksa tetap berperan sebagai fasilitator netral, namun memiliki otoritas akhir untuk menilai kelayakan penyelesaian restoratif.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa mempertahankan otoritas penuntutan berarti menyeimbangkan fleksibilitas *restorasi justice* dengan profesionalisme hukum, sembari terbuka terhadap masukan publik tanpa kehilangan objektivitas dan akuntabilitas kelembagaan.

4.2. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Inkonsistensi

4.2.1 Ketidaksiapan Atau Penolakan Korban Untuk Berdamai

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ende, Dewa Kadek Dwi Naro Sigito, beliau menjelaskan bahwa:

“Berdasarkan pengalaman saya sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ende, salah satu tantangan terbesar dalam penerapan keadilan restoratif itu justru datang dari ketidaksiapan atau penolakan korban untuk berdamai. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan, proses *restorative justice* tidak bisa dilanjutkan kalau korban tidak mau memaafkan pelaku secara sukarela dan tanpa tekanan. Itu sudah diatur jelas dalam Pasal 3 ayat 3 huruf b Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi “Penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan ketentuan telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif”, jelasnya. Dan perlu digarisbawahi, penolakan ini bukan karena aparat penegak hukum yang menghambat, tetapi karena memang belum terpenuhinya syarat keikhlasan dari pihak korban sendiri, tambahnya.”

Fenomena ini memperlihatkan dilema antara penghormatan terhadap hak korban dan upaya rehabilitasi pelaku. Dalam kasus Rustam Efendi, korban bersikeras melanjutkan proses hukum demi keadilan yang lebih bermakna. Situasi ini menekankan pentingnya evaluasi psikososial sebelum mediasi, agar penolakan damai tidak muncul akibat trauma atau tekanan tersembunyi.

Berdasarkan keterangan informan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak boleh hanya mengejar efisiensi penyelesaian perkara, tetapi harus menjamin prinsip keadilan yang utuh dan berpihak pada kondisi nyata korban.

4.2.2 Intervensi Pihak Luar (Tokoh Masyarakat, Aparat Lain, Dan Lain-lain)

Penelitian di Kejaksaan Negeri Ende menunjukkan bahwa intervensi pihak luar seperti tokoh masyarakat, aparat desa, dan LSM berperan penting dalam proses keadilan restoratif pada perkara penganiayaan. Tokoh masyarakat sering bertindak sebagai mediator sosial yang membantu menciptakan perdamaian dengan mendorong pelaku bertanggung jawab dan memberikan rasa aman bagi korban. Kehadiran mereka yang netral dan dihormati turut mendukung keberhasilan proses mediasi.

Namun, tidak semua intervensi bersifat positif. Ditemukan pula intervensi destruktif dari kelompok masyarakat atau LSM yang menolak perdamaian meski korban telah sepakat. Tekanan massa seperti demonstrasi kadang muncul karena konflik pribadi dengan pelaku.

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa Hal ini menjadi tantangan bagi kejaksaan dalam menjaga objektivitas hukum, karena tekanan publik dapat memengaruhi keputusan meskipun syarat hukum telah terpenuhi. Meski demikian, kejaksaan tetap menegaskan bahwa keputusan harus diambil secara independen berdasarkan prinsip keadilan dan hukum, meskipun terbuka terhadap kritik yang konstruktif. Temuan ini memperlihatkan dilema antara prosedur hukum dan ekspektasi keadilan substantif dari masyarakat.

4.2.3 Minimnya Dukungan Masyarakat Terhadap Pendekatan Restoratif

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Juni 2025 dengan informan Rohmat Esa Hasan dari Kejaksaan Negeri Ende, beliau mengungkapkan bahwa:

“Dari hasil pengamatan dan pengalaman saya di Kejaksaan Negeri Ende, salah satu hambatan besar dalam penerapan keadilan restoratif adalah rendahnya dukungan dari masyarakat, ujarnya. Beliau menambahkan Banyak masyarakat yang masih berpandangan bahwa hukuman penjara adalah satu-satunya bentuk keadilan yang pantas, apalagi dalam kasus-kasus seperti penganiayaan.”

Jadi meskipun syarat formal untuk *restorative justice* sudah terpenuhi, pendekatan ini sering kali ditolak atau bahkan dikritik karena dianggap tidak sebanding dengan perbuatan pelaku.

Kurangnya pemahaman dan penerimaan ini membuat proses mediasi sulit dijalankan dan mengurangi keberanian jaksa untuk menghentikan penuntutan melalui jalur restoratif. Contohnya, dalam kasus Rustam Efendi, meskipun pelaku dan korban hampir mencapai perdamaian, tekanan dari masyarakat yang tidak menerima penyelesaian damai menyebabkan pendekatan restoratif gagal diterapkan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan keadilan restoratif tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan literasi hukum masyarakat.

Oleh karena itu dilihat dari keterangan informan yang dijelaskan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa edukasi publik mengenai konsep dan manfaat keadilan restoratif menjadi kunci penting agar pendekatan ini dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

4.2.4 Tidak Adanya Lembaga Pendukung Seperti Mediator Profesional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu hambatan signifikan dalam penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Ende adalah tidak tersedianya lembaga pendukung seperti mediator profesional. Dalam banyak kasus, keberhasilan restoratif justice sangat bergantung pada keberadaan pihak ketiga netral yang memiliki kompetensi mediasi untuk menjembatani kepentingan korban dan pelaku. Ketika proses mediasi hanya difasilitasi oleh jaksa tanpa didampingi mediator profesional, maka potensi ketimpangan posisi, tekanan emosional, dan bias dalam penyelesaian perkara menjadi lebih besar. Hal ini berdampak pada tidak tercapainya pemulihan yang utuh baik bagi korban maupun pelaku. Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara, jaksa memang bertindak sebagai fasilitator, tetapi perannya tidak bisa sepenuhnya menggantikan kapasitas mediator profesional yang terlatih dalam menangani dinamika konflik interpersonal.

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan Rohmat Esa Hasan di Kejaksaan Negeri Ende pada tanggal 25 Juni 2025. Beliau menjelaskan bahwa:

“Ketiadaan lembaga pendukung memang menjadi salah satu kendala utama yang kami hadapi di lapangan. Itu membuat penerapan keadilan restoratif jadi terbatas, baik dari segi jangkauan maupun kualitasnya. Selama ini, pendekatan keadilan pidana masih terlalu berfokus pada hukuman penjara, padahal itu sering kali gagal memberikan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan pemenuhan hak pelaku. Keadilan restoratif sebenarnya bertujuan untuk menciptakan pemulihan melalui dialog, pengakuan kesalahan, dan kesepakatan yang tulus dari kedua belah pihak.”

Namun dalam kenyataan di Ende, proses ini rentan menjadi formalitas administratif semata, apalagi bila hanya berdasarkan surat pernyataan damai

tanpa verifikasi mendalam atas ketulusan para pihak. Ketiadaan mediator profesional menjadikan jaksa satu-satunya aktor penentu arah mediasi, padahal mereka bukan pihak netral secara penuh. Maka tidak mengherankan jika dalam kasus seperti Rustam Efendi, di mana korban menolak berdamai, upaya RJ pun gagal total.

Berikut adalah paragraf penjelas yang menguraikan pernyataan 4.2.4 beserta relevansi kondisi psikologis korban seperti Lily Nurlyah:

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ketiadaan lembaga pendukung berupa mediator profesional menjadi hambatan krusial dalam pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Ende. Mediator profesional yang netral dan terlatih sangat dibutuhkan untuk menjembatani dialog antara korban dan pelaku secara adil, sehingga meminimalisasi ketimpangan posisi dan tekanan emosional selama proses mediasi. Tanpa keberadaan mediator yang kompeten, proses mediasi cenderung bergantung pada jaksa sebagai fasilitator, yang sekalipun berperan penting, tidak sepenuhnya dapat menggantikan fungsi mediator profesional yang memahami dinamika konflik interpersonal secara mendalam. Kondisi ini berdampak pada kualitas penyelesaian perkara yang kurang optimal dan berpotensi menjadikan proses mediasi sekadar formalitas administratif tanpa makna substansial.

penganiayaan Rustam Efendi yang berakhir dengan penolakan korban, Lily Nurlyah, untuk berdamai sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih sensitif dan empatik, terutama mengingat trauma psikologis

korban yang masih mendalam. Penolakan Lily untuk membuka cerita, yang diperkuat oleh perasaan kurang nyaman karena peneliti juga merupakan pegawai Kejaksaan, menunjukkan betapa kompleksnya hubungan psikologis korban dengan proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini mempertegas bahwa keberhasilan keadilan restoratif tidak hanya bergantung pada aturan formal semata, tetapi juga membutuhkan sistem pendukung yang kredibel dan profesional serta pendekatan yang menghormati kesiapan dan kondisi psikologis korban. Tanpa dukungan mediator profesional dan perhatian khusus terhadap aspek emosional korban, implementasi Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 berisiko menjadi kebijakan normatif yang gagal mewujudkan keadilan substantif dan pemulihan menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat.

Dari penjelasan informan diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa tanpa sistem pendukung yang kredibel dan profesional, implementasi Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 hanya akan menjadi kebijakan normatif yang tidak berdampak signifikan terhadap pemulihan keadilan substantif.

4.3. Kelemahan Regulasi dan Pedoman Teknis

4.3.1 Ketiadaan Standar Baku Penilaian Layak/Tidaknya Perkara Restoratif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kelemahan krusial dalam penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Ende terletak pada ketiadaan standar baku penilaian kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan secara restoratif. Meskipun Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor

15 Tahun 2020 telah memberikan arahan normatif mengenai kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, pada praktiknya masih ditemukan ketidakseragaman dalam menilai apakah suatu perkara layak atau tidak untuk dihentikan penuntutannya. Sebagai contoh, pada kasus Winda Dewanti, perdamaian antara pelaku dan korban diterima sebagai dasar untuk penghentian penuntutan, sementara dalam kasus Rustam Efendi, meskipun memenuhi syarat formal seperti ancaman pidana di bawah lima tahun, perkara tetap dilanjutkan karena korban menolak berdamai. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penilaian: apakah cukup dengan pernyataan damai formal, atau adakah indikator objektif lain seperti bukti pemulihan psikologis korban, pengakuan tanggung jawab pelaku secara terbuka, atau keterlibatan tokoh masyarakat yang berwenang.

Ketiadaan standar operasional yang eksplisit dan terukur menimbulkan celah interpretasi yang luas di tingkat pelaksana, dalam hal ini jaksa, yang hanya bertindak sebagai fasilitator. Padahal, dalam konteks keadilan restoratif, keseimbangan antara pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku sangat bergantung pada proses mediasi yang substansial dan transparan. Tidak adanya lembaga pendukung seperti mediator profesional atau psikolog forensik juga memperburuk situasi. Proses mediasi sepenuhnya diserahkan kepada pihak kejaksaan yang tidak memiliki keahlian khusus dalam fasilitasi konflik atau pemulihan trauma. Akibatnya, dalam beberapa kasus, perdamaian yang dicapai bersifat

formalistik, tanpa jaminan bahwa korban telah benar-benar pulih secara emosional maupun sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa instrumen teknis dan lembaga pendukung yang memadai, penerapan keadilan restoratif berisiko menjadi sekadar formalitas prosedural yang tidak memenuhi esensi keadilan itu sendiri, sebagaimana dikhawatirkan dalam temuan lapangan dan wawancara dengan pihak kejaksaan.

Lebih jauh, proses penilaian kelayakan perkara saat ini tidak memiliki indikator evaluatif yang bisa diuji secara objektif. Misalnya, tidak ada tolok ukur yang jelas untuk menilai sikap baik pelaku dalam proses mediasi, ataupun parameter untuk mengukur kerelaan korban untuk berdamai, apakah sungguh-sungguh berasal dari keinginannya sendiri atau dipengaruhi oleh tekanan eksternal.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hal ini menjadi penting, mengingat dalam wawancara juga terungkap bahwa kadangkala terdapat intervensi dari pihak ketiga seperti LSM atau masyarakat yang tidak puas dengan pelaku, sehingga menekan jaksa untuk melanjutkan perkara meskipun pelaku dan korban sebenarnya telah sepakat untuk berdamai. Tanpa pedoman teknis yang jelas dan pengawasan dari lembaga independen, maka risiko terjadinya disparitas dan subjektivitas dalam penerapan keadilan restoratif akan terus mengancam prinsip keadilan yang diusung oleh sistem hukum pidana Indonesia.

4.3.2 Celah Hukum Dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan kasus di Kejaksaan Negeri Ende, dapat disimpulkan bahwa meskipun Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan ruang hukum yang progresif dalam sistem peradilan pidana, namun regulasi ini menyisakan sejumlah celah hukum yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya. Salah satu celah utamanya terletak pada tidak adanya standar baku yang mengatur mekanisme verifikasi kesepakatan damai antara korban dan pelaku, terutama dalam kasus kekerasan fisik seperti penganiayaan. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat 3 huruf b Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi:

“Penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan ketentuan telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif”. Akibatnya, hal ini membuka ruang interpretasi yang terlalu luas bagi jaksa, sehingga proses penyelesaian perkara dapat berujung pada formalitas belaka, tanpa memastikan keadilan sejati bagi korban maupun pelaku.”

Selanjutnya, dalam ketentuan mengenai syarat-syarat perkara yang dapat dihentikan penuntutannya masih menyisakan ambiguitas. Seperti diungkap dalam wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Ende, meskipun perkara penganiayaan memenuhi syarat ancaman pidana di bawah lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 3 huruf b Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan

Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun jika perdamaian tidak tercapai, maka *restorative justice* tidak dapat diberlakukan.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif sepenuhnya bergantung pada kesediaan korban, yang dalam praktiknya bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk tekanan sosial atau intervensi pihak ketiga. Selain itu, Pasal 4 Perja yang mengatur bahwa perkara yang membahayakan nyawa tidak dapat dihentikan penuntutannya melalui RJ juga tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kriteria “membahayakan nyawa” ditentukan apakah melalui tingkat luka, rekam jejak pelaku, atau bentuk kekerasan. Akibatnya, dalam kasus seperti Rustam Efendi, muncul keraguan masyarakat atas keputusan kejaksaan karena belum ada kejelasan kualitatif terhadap batasan-batasan tersebut.

Semua ini memperkuat kesimpulan bahwa Perja Nomor 15 Tahun Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif masih memiliki celah hukum yang cukup signifikan, yang perlu diperjelas agar pelaksanaan keadilan restoratif benar-benar mencerminkan asas kepastian dan keadilan hukum.

4.3.3 Tidak Ada Sanksi Atas Penyimpangan Dalam Penerapan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Juni 2025 bersama informan Rohmat Esa Hasan dari Kejaksaan Negeri Ende, beliau mengungkapkan bahwa:

“Saya melihat bahwa tidak adanya sanksi tegas terhadap penyimpangan dalam penerapan keadilan restoratif menjadi salah satu celah besar dalam penegakan hukum yang adil dan konsisten, Ketika suatu perkara, misalnya kasus penganiayaan, dihentikan penuntutannya melalui mekanisme

restorative justice, sayangnya belum ada mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk menindak jika terjadi pelanggaran terhadap prosedur atau asas keadilan itu sendiri.”

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keputusan penghentian penuntutan dapat diwarnai oleh faktor-faktor non-yuridis seperti relasi sosial, tekanan masyarakat, atau bahkan potensi konflik kepentingan dalam lembaga penegak hukum sendiri. Keadaan ini diperburuk oleh ketiadaan sistem pengawasan independen atau sanksi administratif terhadap jaksa yang tidak menjalankan prinsip restoratif secara benar, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 5 huruf d Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yaitu tentang pelaksanaan proses perdamaian secara sukarela, tanpa tekanan, paksaan, maupun intimidasi.

Penegakan hukum di Indonesia memang masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perlindungan hak asasi pelaku kejahatan. Ketika tidak ada sanksi atas penyimpangan dalam penerapan *restorative justice*, hal ini membuka ruang abu-abu yang melemahkan kredibilitas pendekatan tersebut. Misalnya, dalam kasus Rustam Efendi dan Winda Dewanti, perbedaan hasil akhir menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Ketika salah satu pihak merasa tidak dipulihkan secara utuh, tetapi perkara tetap dihentikan karena formalitas perdamaian telah terpenuhi, maka keadilan menjadi semu.

Dari penjelasan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kejaksaan sendiri menyatakan keberhasilan dalam proses *restorasi justice* sangat bergantung pada terpenuhinya syarat utama, yaitu adanya

perdamaian. Namun, dalam praktiknya, tidak ada instrumen evaluatif yang menguji secara objektif apakah perdamaian itu benar-benar tulus atau sekadar administratif. Oleh karena itu, ketiadaan sanksi atau koreksi atas praktik yang menyimpang ini menjadi akar dari perbedaan dalam penerapan RJ, dan sangat membutuhkan reformasi kebijakan yang mengatur secara tegas sanksi administratif maupun evaluasi berkala terhadap kinerja jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif.